

DAFTAR PUSTAKA

- Teguh Ambar S, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jakob Oetama, *Pers Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Jalaludin Rakhmat, *Komunikasi Politik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Muchsin, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Yogyakarta, 2002.
- Nurudin, *Komunikasi Massa*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2003.
- SEAPA, *Media dan Transparansi*, IRE Press, Yogyakarta, 2004.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

UUD Tahun 1945

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 9 Tahun 1999 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat.

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari KKN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);

PP No. 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Pemilik Modal Asing

PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kepres No. 74 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.